

# **PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL**

Khaeril Wahyu Perdana  
Program Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
khaeril.wahyu.2014@fe.umy.ac.id

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of the competency of village fund management apparatus, local government organization community, participation of community, and use of information technology on accountability of village fund management in Bantul district. This study is a quantitative study that uses primary data based on questionnaires distributed to each village office in Bantul District. The analysis that used in this study is multiple linear regressions with SPSS 15.0. The results of this study indicate that the competence of village fund managers and organizational commitment has no effect towards the accountability of village fund management. However, community participation and the use of technology information affect the accountability of village fund management. This study is expected to be used to realize accountability in village fund management.*

**Keywords:** *the accountability of village fund management, the competency of village fund management apparatus, local government organization community, participation of community, and use of information technology*

## **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013).

Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa yang jumlahnya sangat fantastis ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 127,75 Triliun yang terbagi dalam 3 tahun (2015,

2016, 2017) tiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa (Mada *et al.*, 2017).

**Tabel 1. Anggaran Alokasi Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2015	Rp 20,77 Triliun
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun

Sumber: <https://nasional.tempo.com>

Adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan masyarakat. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa (Cheng *et al.*, 2002). Faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat (Mada *et al.*, 2017).

Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 pedukuhan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten ini masih belum tercapai, hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel .2. Jumlah desa se-Kabupaten Bantul**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	SRANDAKAN	2
2	SANDEN	4
3	PAJANGAN	3
4	SEDAYU	4
5	PANDAK	4
6	KASIHAN	4
7	BANTUL	5
8	KRETEK	5
9	PUNDONG	3
10	BAMBANGLIPURO	3
11	SEWON	4
12	JETIS	4
13	IMOGIRI	8
14	BANGUNTAPAN	8
15	PLERET	5
16	PIYUNGAN	3
17	DLINGO	6
	JUMLAH	75

Sumber: <https://bantulkab.go.id>

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Mada *et al.*, (2017) guna lebih memperdalam pengaruh kompetensi aparat, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada wilayah Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel didasarkan dari adanya keterlambatan pelaporan sehingga tertundanya pencairan dana desa di Kabupaten Bantul (Kurniawan, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Gafar, 2013). Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.”**

## **LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

### **Teori *Stewardship***

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

### **Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)**

Teori penetapan tujuan merupakan salah satu bagian dari teori motivasi, teori ini memaparkan bahwa tindak tanduk individu dikendalikan oleh ide (pemikiran) dan niat yang ada dalam diri individu tersebut (Locke dan Latham, 1990). *Goal setting theory* menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

### **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparat (Mada, *et al.*,2017); (Sudiarianti, *et al.*, 2015); (Irma 2015), sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H<sub>1</sub> : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan teori komitmen organisasi yang menjabarkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi individu akan memengaruhi tingkat kecepatan kerja yang dimilikinya. Dengan kecepatan dan ketepatan bekerja akan memengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai prinsipal (Mowday *et al.*, 1982); (Ferina, 2016); (Mada *et al.*, 2017); (Fajri *et al.*, 2012). Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis:

H<sub>2</sub> : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006), dari teori tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, dan juga agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya (Mada, *et al.*, 2017); (Karimah, 2014); (Arifiyanto dan Kurrohman, 2017). Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis:

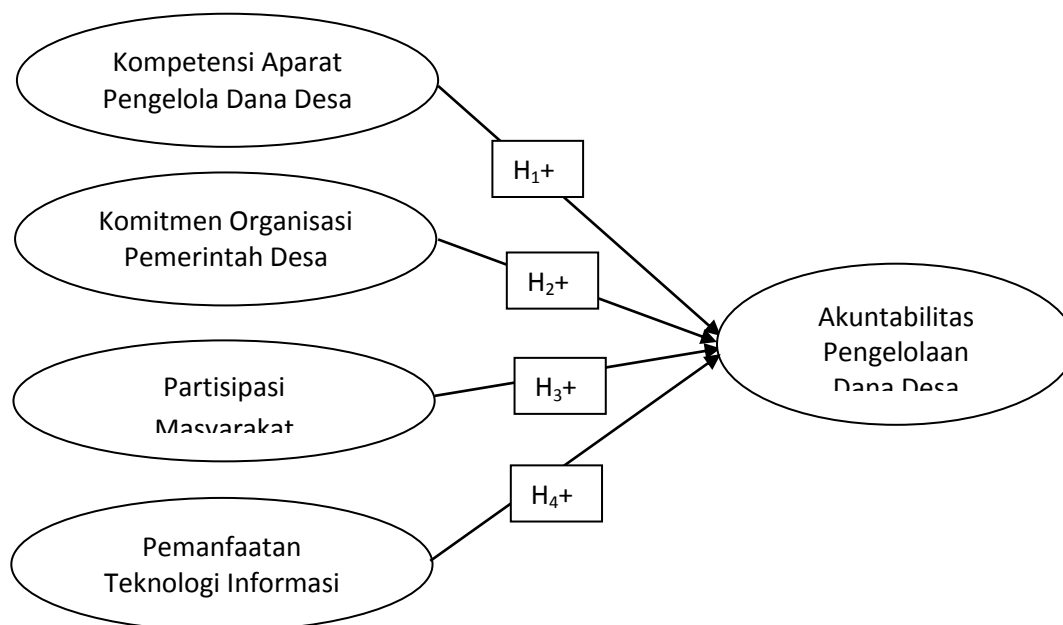
H<sub>3</sub> : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. (Andriani, 2012); (W. Komalasari, 2017); (Yadnya, et al., 2017), sehingga peneliti merumuskan hipotesis keempat:

H<sub>4</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **MODEL PENELITIAN**



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

### Subyek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah 75 desa yang terdapat di kabupaten Bantul, sampel dari penelitian ini adalah 30 desa, dan aparatur pengelola dana desa di Kabupaten Bantul sebagai responden penelitian.

### Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data skor jawaban kuesioner dari masing-masing responden. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer yang berarti data yang diperoleh dari kuisisioner yang dibagikan kepada para responden.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *convenience* sampling. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 30 desa dengan responden dalam penelitian ini sebanyak 120 aparatur yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan dari masing-masing desa.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara disampaikan langsung kepada aparatur desa yang ada di desa pada kabupaten Bantul. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi aparatur pengelola dana desa yang dimiliki, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa. Jawaban pada kuosioner dibatasi berdasarkan skala *likert* dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat kesetujuan responden.

### Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Dependen dan Independen**

	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kejujuran dan Hukum	- Kejujuran dan keterbukaan informasi - Kepatuhan dalam pelaporan

	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
(Mahmudi, 2011) <i>Skala Likert</i>	Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian prosedur</li> <li>- Kecukupan informasi</li> <li>- Ketepatan penyampaian laporan</li> </ul>
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (Edison <i>et al</i> , 2016) <i>Skala Likert</i>	Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan</li> <li>- Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan</li> </ul>
	Kemampuan ( <i>skill</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keahlian teknis</li> <li>- Kemampuan mencari solusi</li> </ul>
	Sikap ( <i>attitude</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiatif dalam bekerja</li> <li>- Keramahan dan kesopanan</li> </ul>
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (Porter <i>et al</i> , 1974) <i>Skala Likert</i>	Afektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keyakinan terhadap tujuan organisasi</li> <li>- Perasaan memiliki organisasi</li> </ul>
	Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan keanggotaan organisasi</li> <li>- Kesetiaan dalam organisasi</li> </ul>
	Normatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi</li> </ul>
Partisipasi Masyarakat (Heller <i>et al</i> , 1984, dan Sujarweni (2015) <i>Skala Likert</i>	Pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa</li> </ul>
	Penyusunan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan rencana anggaran</li> <li>- Terlibat dalam rapat paripurna</li> </ul>
	Pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlibat mengawasi dan melaporkan</li> <li>- Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran</li> <li>- Memberikan penghargaan</li> </ul>
Pemanfaatan teknologi informasi (W. Komarasari, 2017) <i>Skala Likert</i>	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya software pendukung</li> <li>- Ketersediaan jaringan internet</li> </ul>
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimanfaatkan sesuai ketentuan</li> <li>- Proses terkomputerisasi</li> </ul>

## Data Analysis

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.



## Uji Kualitas Instrumen

- (1) Uji Validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang perlu untuk diukur. Jika validitasnya tinggi maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya, sehingga data yang digunakan merupakan data yang memadai. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila semua item pembentuk variabel memiliki korelasi ( $r$ ) dengan skor total masing-masing variabel  $\geq 0,25$  (Nazaruddin & Basuki, 2017).
- (2) Uji Reliabilitas. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden yang diterima. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS yang dilihat dari nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 maka reliabilitas terpenuhi.

## Uji Asumsi Klasik

- (1) Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal. Jika nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari alpha 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari alpha 0,05 maka data berdistribusi normal.
- (2) Uji Multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam model terdapat korelasi antar variabel independennya. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) (Nazaruddin & Basuki, 2017). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai *tolerance*  $> 0,01$ , maka tidak ada multikolinearitas diantara variabel independennya dan sebaliknya.
- (3) Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya signifikan lebih dari alpha 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis

Rumus regresi berganda pada penelitian ini adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien regresi linier X
$X_1$	= Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa
$X_2$	= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
$X_3$	= Partisipasi Masyarakat
$X_4$	= Pemanfaatan teknologi informasi
e	= Error

### (1) Uji-T

Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sehingga akan diketahui hasil untuk masing-masing hipotesis yang diajukan.

### (2) Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan cara melihat seberapa besar masing-masing *adjusted R square* pada masing-masing variabel independen yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya.

### (3) Uji-F

Uji F digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil pengujian dapat dilihat melalui table *ANOVA* pada kolom sig.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Demografi Kuesioner

Data diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarakan kepada responden penelitian, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan pembangunan pemerintah desa di Kabupaten Bantul. Dari 30 desa yang dijadikan sampel, peneliti telah menyebarkan sebanyak 120 kuesioner dengan tingkat pengembalian yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Distribusi Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	120	100
2	Kuesioner yang kembali	92	76
3	Kuesioner yang tidak kembali	28	24
4	Kuesioner yang dapat diolah	92	76

Sumber: data primer yang diolah (2018)

### **Demografi Responden**

Berdasarkan 96 kuesioner yang telah disebar, berikut ini demografi responden yang dapat diketahui berdasarkan usia, dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Karakteristik Responden**

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Usia		
	a. 21-30 tahun	42	46
	b. 31-40 tahun	12	13
	c. >40 tahun	15	16
	d. Tidak mengisi	23	25
	Total	92	100
2	Jenjang pendidikan		
	a. SMP	9	10
	b. SMA	64	70
	c. S1	19	20
	Total	92	100

Sumber: data primer yang diolah (2018)

### **Hasil Uji Kualitas Instrumen dan Analisis Data**

#### **Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik diskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 5. Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std.
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KA	92	11	24	35	32,08	,262	2,513
KO	92	15	15	30	23,25	,386	3,699
PM	92	14	16	30	25,22	,325	3,113
PT	92	8	17	25	23,16	,241	2,312
AK	92	8	17	25	22,74	,249	2,385
Valid N (listwise)	92						

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui gambaran jumlah jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing variabel penelitian. Pada variabel kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 24, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 32,08 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 butir pernyataan. Sedangkan variabel komitmen organisasi pemerintah desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 15, nilai maksimum 30 dan nilai rata-ratanya sebesar 23,25 dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir pernyataan.

Variabel partisipasi masyarakat memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 16, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata 25,22 dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir pernyataan. Sedangkan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 17, nilai maksimum 25, dan nilai rata-rata jumlah jawaban responden 23,16 dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 butir. Sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki jumlah jawaban minimum sebesar 17, nilai maksimum 25 dan nilai rata-ratanya sebesar 22,74 dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 butir pernyataan.

## **Hasil Uji Kualitas Instrumen**

### **(1) Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang perlu untuk diukur. Suatu instrumen penelitian

dikatakan valid apabila semua item pembentuk pertanyaan dalam kuesioner memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel  $\geq 0,25$  (Nazaruddin & Basuki, 2017).

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	Keterangan
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	AK 1	0,669	Valid
	AK 2	0,854	
	AK 3	0,879	
	AK 4	0,832	
	AK 5	0,716	
Kompetensi aparat pengelola dana desa	KA 1	0,534	Valid
	KA 2	0,633	
	KA 3	0,651	
	KA 4	0,618	
	KA 5	0,738	
	KA 6	0,622	
	KA 7	0,611	
Komitmen organisasi pemerintah desa	KO 1	0,583	Valid
	KO 2	0,608	
	KO 3	0,752	
	KO 4	0,782	
	KO 5	0,743	
	KO 6	0,546	
Partisipasi masyarakat	PM 1	0,763	Valid
	PM 2	0,723	
	PM 3	0,751	
	PM 4	0,818	
	PM 5	0,636	
	PM 6	0,578	
Pemanfaatan teknologi informasi	PT 1	0,730	Valid
	PT 2	0,795	
	PT 3	0,784	
	PT 4	0,769	
	PT 5	0,664	

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas diatas dapat diketahui bahwa korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel  $\geq 0,25$ , sehingga seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini valid untuk mengukur masing-masing variabel.

## (2) Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden yang diterima. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 maka reliabilitasnya tinggi dan terpenuhi.

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
AK	0,847	> 0,70	Reliabel
KA	0,738		
KO	0,755		
PM	0,804		
PT	0,792		

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji validitas diatas dapat diketahui bahwa seluruh nilai *cronbach's alpha* tiap variabel lebih dari nilai standar reliabilitas yang digunakan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner cukup tinggi.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

### (1) Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk regresi substruktur 1 dan substruktur 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75274159
MostExtreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,055
	Negative	-,127
Kolmogorov-Smirnov Z		1,220
Asymp. Sig. (2-tailed)		,102

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji normalitas regresi diketahui bahwa nilai *asympt sig. (2-tailed)* adalah sebesar  $0,102 > \alpha 0,05$  sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

## (2) Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam uji multikolinearitas yang dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) (Nazaruddin & Basuki, 2017). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai *tolerance*  $> 0,01$ , maka tidak ada multikolinearitas diantara variabel independennya dan sebaliknya. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan untuk regresi substruktur 1 dan substruktur 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KA	,722	1,385
KO	,820	1,220
PM	,763	1,311
PT	,808	1,237

- a. Dependent Variable: AK

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji multikolinearitas regresi dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel kompetensi aparat pengelola dana desa dan variabel komitmen organisasi pemerintah desa sebesar 1,385 dan 1,220 < 10 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,722 dan 0,820 > 0,01, dan nilai VIF untuk variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,311 dan 1,237 < 10 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,763 dan 0,808 >0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas.

### (3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji glejser dengan syarat nilai signifikan lebih dari alpha 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan uji heterokedastisitas yang telah dilakukan untuk regresi substruktur 1 dan substruktur 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,015	1,668		3,606	,001
KA	-,038	,052	-,090	-,747	,457
KO	-,014	,033	-,050	-,439	,662
PM	-0,47	,040	-,135	-1,157	,250
PT	-,082	,053	-,175	-1,541	,127

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji heteroskedastisitas regresi diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar 0,457, untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,662, untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,250, dan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,127 Keempat variabel memiliki tingkat signifikansi > alpha 0,05 sehingga asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas.



## Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan cara melihat seberapa besar masing-masing *adjusted R square* pada masing-masing variabel independen yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,678 <sup>a</sup>	,460	,435	1,793	2,178

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_PT, TOTAL\_KO, TOTAL\_PM, TOTAL\_KA

b. Dependent Variable: TOTAL\_AK

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji koefisien determinasi regresi untuk substruktur 1 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,435 yang artinya bahwa variabel independen SIA dan SDM mampu menjelaskan variabel intervening SPI sebesar 43,5% sisanya sebesar 56,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Hasil Uji-F

Uji F digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian dapat dilakukan menggunakan alat bantu statistik SPSS. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 12. Hasil Uji-F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238,178	4	59,544	18,530	,000 <sup>a</sup>
	Residual	279,561	87	3,213		
	Total	517,739	91			

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_PT, TOTAL\_KO, TOTAL\_PM, TOTAL\_KA

b. Dependent Variable: TOTAL\_AK

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji nilai F di atas pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,530, hal tersebut lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi dari hasil uji di atas menunjukkan 0,000, dimana kurang dari 0,05 yang menjadi level signifikansi. Oleh karena itu, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Hasil Uji-T

Uji-T digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sehingga akan diketahui hasil untuk masing-masing hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan Uji-T yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Uji-T Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,648	2,849		,578	,565
KA	,124	,088	,130	1,404	,164
KO	,020	,056	,030	,348	,729
PM	,291	,069	,379	4,205	,000
PT	,403	,090	,391	4,463	,000

a. Dependent Variable: AK

Sumber: data primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel 4.11 yaitu coefficients table dengan melihat nilai unstandardized coefficient B didapatkan model regresi sebagai berikut,

$$AK = 1,648 + 0,291 PM + 0,403 PT + e$$

## PEMBAHASAN

### Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kompetensi menjadi karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam karyanya (Spencer & Spencer, 1993). Joko (2005) menyatakan bahwa kinerja individu dapat optimal jika individu memiliki kompetensi yang dapat diandalkan di bidangnya. Keandalan kompetensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu, antara lain: (1)

Kompetensi pencapaian tujuan, (2) kompetensi pemecahan masalah , (3) kompetensi interaksi dengan orang lain dan (4) kompetensi kerja tim. Penilaian kompetensi juga dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993), yaitu ada 20 jenis kompetensi dan salah satunya adalah kerja tim (*teamwork*).

Berdasarkan kuesioner yang diberikan, pertanyaan yang diajukan cenderung menilai kompetensi individu aparat pengelola dana desa, sehingga tidak mencerminkan kompetensi interaksi dengan orang lain dan kompetensi kerja tim (*teamwork*). Oleh karena itu kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Hasil penelitian Nasir dan Oktari (2011) menunjukkan bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu keberhasilan pengelolaan keuangan, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada elemen terkecil dari pemerintahan. Komitmen organisasi menjadikan individu untuk bertanggung jawab dan berpihak pada organisasi, dengan keberpihakan pada organisasi belum dapat menyajikan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana desa tanpa adanya tindakan (*action*) untuk pencapaian sasaran organisasi (Robbins dan Judge, 2007).

Pengelolaan dana desa memerlukan kepercayaan dan tanggungjawab yang tinggi, hal tersebut menjadi hal yang harus dimiliki oleh seluruh aparat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam organisasi. Menjalankan tugas dengan baik harus didukung dengan perhatian yang baik pula dari organisasi, tugas yang terlaksana dengan baik harus diberi apresiasi dan reward untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi.

### **Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

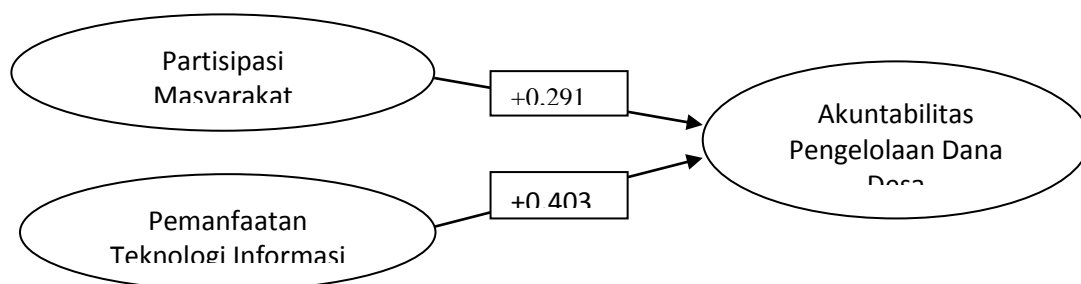
Menurut teori *stewardship*, aparat yang diberi tugas dan tanggungjawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan dan akuntabel, sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam memantau dan menilai pengelolaan dana desa akan

mengurangi tingkat kecurangan atau penyelewengan yang akan dilakukan oleh aparat dikarenakan dipantau dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menjadi patokan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan, dengan terlibatnya masyarakat maka pemerintah dapat mengetahui harapan yang muncul dalam masyarakat dari tanggapan yang diberikan yang didapat dari laporan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini diantaranya terjadi peningkatan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat, dan adanya tekanan dari persaingan bisnis.

Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparat dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparat lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparat akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.



**Gambar 2**  
**Model Penelitian**

## **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan jumlah kecamatan 17 dan desa 75, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 desa dan teknik pengambilan sampelnya adalah *convaniance sampling*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terdapat dua variabel yang diterima dari hasil pengujian yang dilakukan, variabel tersebut adalah partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Pengelolaan desa yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat pesat kemajuannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di desa.

Kedua, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terdapat 2 variabel yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel tersebut adalah kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi. Pengelolaan dana desa harus dilakukan oleh aparat yang memiliki kemampuan yang baik, namun tidak hanya kemampuan yang memadai yang diperlukan dalam pengelolaan tingkat pendidikan dan intensitas pelatihan yang diselenggarakan juga berpengaruh dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa salah satunya juga dipengaruhi oleh komitmen organisasi, namun hal tersebut tidak berpengaruh untuk elemen pemerintah terkecil, selain itu komitmen organisasi juga

tidak begitu berpengaruh tanpa adanya tindakan yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi dan juga pemerintah desa juga perlu dukungan dan kepercayaan dari organisasi untuk mencapai tujuan baik dalam bentuk penghargaan atau *reward*.

## **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

### **1. Saran Untuk Praktisi**

- a. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pelatihan dengan intensitas yang lebih untuk meningkatkan kompetensi aparat pemerintah.
- b. Meningkatkan perhatian kepada aparat terkait halnya terhadap tanggung jawab kepada organisasi, perhatian dapat berupa penghargaan kepada aparat.

### **2. Saran Secara Teoritis**

- a. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti pelatihan, dan tingkat pendidikan
- b. Melengkapi penelitian dengan metode wawancara agar meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan.
- c. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan dan memperbaiki butir-butir pertanyaan kuesioner agar menghasilkan data yang lebih valid dan reliabel.
- d. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator kompetensi tim pada butir-butir pertanyaan kuesioner variabel kompetensi aparat pengelola dana desa agar lebih menggambarkan pengaruh kompetensi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner tanpa dilengkapi dengan metode wawancara, sehingga jawaban responden rawan terhadap informasi yang bias.
2. Penelitian ini masih menggunakan kuesioner penelitian terdahulu yang mungkin terjadi kekeliruan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 69–80.
- Arifiyanto, Dwi Febri., dan Kurrohman, Taufik. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2, No.3, hal.481-493.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Edison, Emron., Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) ( Studi pada Kantor Desa Ketindan , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang ). *Jurusan Administrasi Publik*, 3, 1099–1104.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.14, No.3. Hal.321-336.
- Gafar, T. F. 2013. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Government) Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Alboacen*
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*. Vol.3, No.1, Hal.121-137.
- Joko, N.H. (2005). Urgensi pengembangan SDM berbasis kompetensi. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 1(2), 51-58.
- Karimah, Faizatul. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Komalasari, I. A. (2015). Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Di

Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Repository UMY*, 1–32.

Kurniawan, David. 2018. “21 Desa di Bantul Belum Serahkan Laporan Pemakaian Dana Desa”. *Jogjapolitan*, 27 September. Diakses pada 28 September 2018. <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/27/511/942219/21-desa-di-bantul-belum-serahkan-laporan-pemakaian-dana-desa->

LMIS (Lockheed Martin Information Systems). 1999. Year 2000 Issues. Statement accessed on company website during 1999.

Locke, E. A. & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting & task performance*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice hall.

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,”* 106–115.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

McClelland, D. C. (1973). *Testing for competence rather than intelligence*. *American Psychologist*, 1-14.

Mowday, R.T., Porter, L.W., & Steers, R.M. (1982). *Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover*. New York: Academic Press.

Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182.

Nasir, A., & Oktari, R. (2011). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)". *Jurnal Ekonomi*, 19(2).

Ndraha, Taliziduhu. (1999). *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta

Srimindarti, C. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Premature Sign-Off Dengan Turnover Intention Sebagai Variabel Intervening : Suatu tinjauan dari. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(1995).

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*.

Robbins, S. P. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks . Gramedia. Edisi Kesepuluh.

Robbins SP, & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.



- Rudana, N. 2005. Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Setiyono, Budi, 2014, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: CAPS.
- Spencer, M.L. & Spencer, M.S. (1993). *Competence at work models for superior performance*. John Willy & Son: New York, USA.
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Impikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (n.d.). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya. *Universitas Widiatama*.
- Suwardi, S., & Utomo, J. (2011). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Setda Kabupaten Pati). *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(1), 75–86.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Trisaputra, A. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, FokusMedia,Bandung.
- Yadnya, N. W. A., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8.